



Framing Media Terhadap Dinamika Hukum dan Politik: Analisis Editorial Berita Tempo “Politisasi Penahanan Tom Lembong”

Rifqi Prayogi¹, Quisha Rahma Chandra²

¹ Ilmu Komunikasi, Universitas Sumatera Utara

² Ilmu Komunikasi, Universitas Sumatera Utara

rifqiprayogi5@gmail.com, quisharhmaa@gmail.com

Abstrak

This research analyzes the media framing of legal and political dynamics in Indonesia, focusing on Tempo's editorial titled “Politisasi Penahanan Tom Lembong.” This analysis aims to explore how a media is able to frame legal issues related to politicization, as well as its impact on public views. Using Robert Entman's framing concept analysis framework, this study identified four framing elements: problem definition, cause diagnosis, moral judgment, and resolution recommendation. The results stated that Tempo defined Tom Lembong's detention as a form of politicization of the law and injustice, by highlighting the use of legal institutions as political tools by the authorities. Tempo also assessed the Attorney General's actions as undermining the principle of justice and offered recommendations to maintain the neutrality of legal institutions. The framing has created a narrative that influences public opinion regarding the independence of law enforcement agencies in Indonesia. This research highlights the importance of the media in shaping people's views on critical issues, especially in the context of law and politics.

Keywords: Analysis, Framing, Editorial, Politicization, Tom Lembong

Penelitian ini menganalisis tentang *framing* media dinamika hukum dan politik di Indonesia berfokus terhadap editorial Tempo berjudul “Politisasi Penahanan Tom Lembong.” Analisis ini bertujuan mendalami bagaimana sebuah media mampu membingkai isu hukum yang terkait dengan politisasi, serta dampaknya terhadap pandangan masyarakat. Dengan menggunakan kerangka analisis konsep *framing* Robert Entman, penelitian ini mengidentifikasi empat elemen *framing*: pendefinisian masalah, diagnosis penyebab, penilaian moral, dan rekomendasi penyelesaian. Hasil penelitian menyatakan bahwa Tempo mendefinisikan penahanan Tom Lembong sebagai bentuk politisasi terhadap hukum dan ketidakadilan, dengan memberikan sorotan pada penggunaan lembaga hukum sebagai alat politik oleh penguasa. Tempo juga memberikan penilaian tindakan Kejaksaan Agung mencederai prinsip keadilan serta menawarkan rekomendasi agar menjaga netralitas lembaga hukum. *Framing* tersebut telah menciptakan narasi yang memengaruhi opini masyarakat terkait independensi lembaga penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini menyoroti pentingnya media dalam membentuk pandangan masyarakat terhadap isu kritis, khususnya di dalam konteks hukum dan politik.

Kata Kunci: Analisis, Framing, Editorial, Politisasi, Tom Lembong

PENDAHULUAN

Dinamika hukum dan politik di Indonesia menjadi sebuah sorotan yang serius dalam beberapa waktu terakhir. Politisasi yang dilakukan oleh institusi hukum kerap dikaitkan dengan upaya pemerintah atau penguasa dalam upaya konsolidasi kekuatan politik mereka. Istilah demokrasi yang digaungkan dalam sistem bernegara di Indonesia berfungsi sebagai sebuah kamufase kepentingan penguasa dan sekaligus meligitimasi kebijakan publik penguasa. Meskipun para penguasa mengklaim diri mereka telah menerapkan prinsip demokrasi, tindakan mereka tidak jarang bertolakbelakang dengan nilai tersebut yang menyebabkan supremasi hukum sulit diterapkan dan mengakibatkan lemahnya jaminan mendapatkan kepastian hukum dalam praktiknya (Alamsyah & Undang, 2020).

Fenomena tersebut dapat dilihat dari kejaksaan agung, sebuah lembaga penegak hukum yang diperalat untuk menindak pihak yang dianggap bertolakbelakang dengan kepentingan politik penguasa. Kasus yang relevan dengan konteks ini adalah penahanan mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong oleh kejaksaan agung, yang pada Pilpres 2024 lalu menjadi tokoh yang mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Kejaksaan agung menyoroti Tom Lembong telah melakukan korupsi kebijakan impor gula selama masa jabatannya. Kasus ini menyoroti dugaan adanya penyalahgunaan kewenangan hukum sebagai alat politik. Namun, pernyataan mengenai bukti, seperti kerugian negara sebesar Rp 400 miliar yang menjadi dugaan lembaga tersebut, didasari dari sebuah kesalahan prosedural dan bukan tindak pidana korupsi.

Netralitas kejaksaan agung sebagai lembaga hukum dipertanyakan karena tidak turut juga mengusut kebijakan yang sama di era menteri yang lainnya. Kasus ini tidak hanya menjadi sebuah isu hukum, tetapi juga sebagai cerminan tentang ketidaksetaraan masyarakat di mata hukum dan memungkinkan terjadinya politisasi. Menurut Riyanto dalam Anggraeni & Damayanti (2022), penegak hukum yang tidak mampu menjalankan tugasnya sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam undang-undang akan memiliki negatif terhadap penegakan hukum di Indonesia.

Menurut Benmetan & Setyowibowo (2021), media berperan dalam merepresentasikan isu, serta juga memiliki peran yang sentral dalam mengatur dan membingkai suatu isu. Dalam konteks hukum dan keadilan, media berperan dalam membentuk cara masyarakat dalam memahami dan menilai suatu isu hukum. Kemampuan media dalam memengaruhi pandangan masyarakat melalui pemberitaan dan cara mereka membingkai informasi. Saat media memberikan penekanan terhadap aspek tertentu dari sebuah kasus, hal tersebut mampu memengaruhi masyarakat dalam penilaiannya terhadap keadilan dari keputusan hukum yang diambil (Kusumaningsih, 2024).

Editorial Tempo mendeskripsikan penahanan Tom Lembong tidak hanya sebagai sebuah masalah hukum, tetapi menjadi isu politisasi. Menjadi salah satu media terkemuka di Indonesia, proses *framing* berita oleh Tempo berpotensi memengaruhi opini masyarakat terhadap keadilan hukum di negara ini. Framing berita terbukti memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk opini politik, menunjukkan bahwa cara suatu berita disajikan dapat mengarahkan opini publik dalam ranah politik (Chandra, Hartiana, & Nanang, 2022). Oleh karena itu, pentingnya menganalisis bagaimana cara Tempo menyajikan isu penahanan ini dalam mengungkap hubungan antara *framing* media dan pandangan masyarakat dalam memandang keadilan hukum.

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini akan mengeksplorasi mengenai teks editorial Tempo yang berjudul “Politisasi Penahanan Tom Lembong” yang terbit di majalah Tempo pada tanggal 10 November 2024. Penelitian dilakukan untuk mengidentifikasi pola *framing* yang digunakan oleh media Tempo dalam menyajikan isu hukum dan politik. Pemahaman juga menjelaskan pengaruh media dalam membentuk pandangan masyarakat terhadap keadilan hukum.

TINJAUAN PUSTAKA

Berita merupakan proses penyampaian informasi kepada masyarakat melalui media massa, baik media elektronik ataupun cetak. Informasi yang disampaikan mencakup tujuan dalam memberikan edukasi dan hiburan. Konten yang disajikan melalui media massa umumnya memuat salah satu dari tiga misi utama: memberikan informasi, pendidikan, atau wawasan, juga aspek kehidupan (Effendy, Zakaria, azlisa & anggarana, 2023).

Menurut Tuchman dalam Sofian dan Lestarini (2020), menyatakan berita adalah sebuah hasil dari konstruksi realitas sosial. Proses tersebut bukan hanya menjelaskan realitas, melainkan membentuk realitas itu sendiri. Berita yang disajikan oleh media massa juga tidak sering mewakili fakta ataupun kenyataan secara utuh dan objektif, melainkan sebuah hasil dari proses pengolahan fakta untuk disebarkan kepada publik.

Tuchman juga menekankan bahwa berita sering kali menjadi alat pendukung bagi instrumen negara yang memiliki legitimasi serta berfungsi dalam mempertahankan kekuasaannya. Proses konstruksi dalam berita terdiri dari berbagai faktor yang saling memengaruhi dengan tujuan untuk mempertahankan kekuasaan.

Menurut Tamburaka dalam Santoso (2020), media massa memiliki fungsi sebagai alat dalam menyampaikan berita secara luas serta dapat dilihat masyarakat secara komprehensif. Media juga dapat berfungsi sebagai perantara dalam menyampaikan berita kepada masyarakat dengan jangkauan yang lebih luas secara bersamaan. Pesan yang disampaikan dalam berita dirancang dengan sebuah tujuan. Proses *framing* pesan melalui teks, gambar, dan suara menjadi strategi media untuk memengaruhi pemikiran dan emosi audiens. Salah satu hal cukup menarik dan penting dikaji secara mendalam adalah bagaimana media membentuk sebuah realitas melalui penyajian sebuah berita. (Rahayu, 2023).

Seorang ahli yang mendasari analisis *framing* dalam kajian isi media adalah Entman. Ia menggunakan konsep *framing* untuk menjelaskan proses seleksi dan penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas oleh media. *Framing* dapat diartikan sebagai upaya menyusun informasi dalam konteks tertentu sehingga satu isu mendapatkan perhatian lebih besar dibandingkan isu lainnya. *Framing* yang dilakukan oleh media memiliki kekuatan dalam memengaruhi pandangan masyarakat dalam isu tertentu dengan pemilihan kata, gambar, dan fokus dalam berita (Wardhana, Najwan, & Azmi, 2023).

Menurut Entman, *framing* meliputi aktivitas mendefinisikan, menjelaskan, mengevaluasi, dan memberikan rekomendasi dalam suatu wacana untuk menekankan kerangka berpikir tertentu terhadap peristiwa yang diangkat (Sartika, Ritonga, & Jailani, 2023). Entman dalam jurnal Alrizki & Aslinda (2022), *framing* dapat dibagi dalam empat elemen utama yang merupakan alat analisis yang memperlihatkan *framing* dari suatu media. Pertama, *define problems* atau pendefinisian masalah, adalah elemen paling fundamental dalam menentukan bagaimana sebuah peristiwa atau isu dapat dipahami. Isu yang sama dapat diterjemahkan dengan berbeda oleh masyarakat yang dipengaruhi oleh cara pembingkaiannya, yang akibatnya menghasilkan sebuah interpretasi terhadap realitas yang berbeda pula.

Kedua, *diagnose causes* memperkirakan penyebab masalah, memiliki fokus pada identifikasi pelaku atau faktor yang menjadi penyebab dari suatu peristiwa. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh sebab tertentu (*what*) atau pihak tertentu (*who*) yang di mana penafsiran terhadap suatu peristiwa dapat memengaruhi siapa atau apa yang menjadi sumber masalah.

Ketiga, *make moral judgements* atau membuat pilihan moral, memiliki tujuan dalam memberikan pembenaran ataupun argumentasi dari pendefinisian masalah. Ketika masalah dapat didefinisikan dan penyebabnya ditentukan, sebuah argumen sangat diperlukan agar dapat diterima oleh khalayak untuk mendukung argumen tersebut.

Terakhir, *treatment recommendation* atau penekanan pada penyelesaian, berfungsi sebagai usulan solusi terhadap masalah. Cara penyelesaian yang diusulkan dipengaruhi oleh bagaimana masalah didefinisikan dan siapa yang dipandang sebagai penyebabnya.

Tinjauan ini menjelaskan aspek teoritis yang memiliki relevansi dalam memahami bagaimana *framing* yang dilakukan oleh media, khususnya editorial Tempo dalam memengaruhi pandangan masyarakat terhadap kasus penahanan Tom Lembong.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu metode yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan serta perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini bertujuan menjelaskan makna di balik realitas dan membangun proposisi (Siregar & Qurniawati, 2022). Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode analisis *framing*. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengeksplorasi makna di balik pesan yang disampaikan oleh editorial Tempo, khususnya dalam membingkai isu penting.

Kerangka teoritis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah konsep *framing* Robert Entman, yang mengidentifikasi empat elemen utama dalam *framing*, yaitu *define problems*, *diagnose causes*, *make moral judgments*, dan *suggest remedies*. Keempat elemen tersebut menjadi instrumen dalam menganalisis bagaimana sebuah berita dirancang dalam membentuk pemahaman tertentu di benak masyarakat.

Data penelitian mengambil artikel editorial Tempo berjudul "Politisasi Penahanan Tom Lembong" sebagai sumber utama dalam analisis. Artikel tersebut dipilih karena dapat merepresentasikan sebuah kondisi terkait politisasi hukum di Indonesia. Penelitian juga disertakan dengan data pendukung yang diambil dari berita tempo tentang kasus penahanan Tom Lembong.

Data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan kerangka konsep Entman untuk mengidentifikasi elemen *framing* dalam artikel tersebut. Proses ini melibatkan temuan dalam konteks dinamika politik dan hukum di Indonesia, dengan tujuan memahami bagaimana media dapat membingkai sebuah isu politisasi hukum dalam memengaruhi persepsi dan opini masyarakat. Pendekatan ini memiliki tujuan dalam menggali bagaimana *framing* media dapat membentuk pemahaman dan persepsi masyarakat terhadap isu politisasi hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

a. *Define Problems*

Editorial Tempo mendefinisikan penahanan Tom Lembong sebagai bentuk politisasi hukum dan ketidakadilan dalam penegakan hukum. Isu tersebut ditekankan untuk menerangkan bahwa Kejaksaan Agung telah melakukan penyalahgunaan institusi hukum demi kepentingan politik yang berpotensi merusak prinsip kesetaraan di mata hukum. Tempo juga memberikan sorotan bahwa tuduhan tersebut didasarkan terhadap kesalahan prosedural, bukan menggunakan bukti yang kuat atas tindak pidana korupsi.

b. *Diagnose Causes*

Penyebab masalah editorial tersebut menyoroti dugaan penggunaan Kejaksaan Agung sebagai instrumen politik oleh pihak penguasa. Tempo membingkai bahwa kasus penahanan ini merupakan memiliki unsur politis mengingat Tom Lembong merupakan pendukung Anies Baswedan seorang calon oposisi dalam Pilpres 2024. Tempo mempertanyakan Kejaksaan Agung karena tidak mengusut kasus yang sama di era menteri lain setelah menerapkan kebijakan impor gula.

c. *Make Moral Judgments*

Editorial Tempo mengenai kasus ini memberikan penilaian moral terhadap tindakan Kejaksaan Agung yang tidak adil dan mencederai kepercayaan masyarakat terhadap netralitas sebuah lembaga hukum. Menargetkan Tom Lembong diantara mantan menteri lain, Tempo menilai terjadinya ketidakseimbangan dalam proses hukum dikarenakan fakta bahwa Kejaksaan Agung tidak menerapkan tindakan yang sama terhadap menteri perdagangan lainnya.

d. *Suggest Remedies*

Solusi yang ditawarkan Tempo melalui editorial tersebut agar memastikan lembaga hukum tidak mempolitisasi penegakan hukum, dengan mendesak Kejaksaan Agung agar bekerja sesuai bukti yang kuat dan menjaga prinsip netralitas. Presiden Prabowo Subianto juga diharapkan dapat berperan aktif untuk memastikan lembaga penegak hukum tidak dijadikan sebagai sebuah instrumen untuk kepentingan politik.

Pembahasan

Framing yang dilakukan oleh Tempo dalam editorialnya yang berjudul “Politisasi Penahanan Tom Lembong” menciptakan sebuah narasi yang kritis kepada kejaksaan agung serta pemerintah yang khususnya dalam permasalahan dinamika politik dan hukum. Mendefinisikan masalah sebagai politisasi hukum, Tempo berupaya membangun pandangan masyarakat bahwa penahanan Tom Lembong bukan hanya semata-mata berdasarkan hukum, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan politik pihak tertentu. Editorial tersebut memiliki potensi dalam memengaruhi pembaca agar meragukan independensi dari lembaga penegakan hukum di Indonesia.

Diagnose causes editorial tersebut menuding kejaksaan agung sebagai dalang utama dari kasus ini memberikan penguatan argumen kritik terhadap lembaga tersebut. Tempo membingkai penahanan Tom Lembong sebagai sebuah langkah yang bias, karena penggunaan instrumen hukum dalam melemahkan oposisi politik. *Framing* dalam editorial tersebut dapat memengaruhi opini masyarakat dengan menciptakan pandangan bahwa penegakan hukum tidak menjalankan perannya secara adil dan hanya menasar pihak tertentu yang berlawanan.

Make moral judgments yang digunakan Tempo dengan menekankan pentingnya sebuah keadilan dan transparansi di dalam proses hukum. Menyebut tindakan kejaksaan agung sebagai sebuah bentuk ketidakadilan, Tempo mengarahkan pembaca agar mengevaluasi ulang sikap netral dari lembaga tersebut. *Framing* tersebut dapat memperkuat pandangan negatif terhadap pemerintah terutama di kalangan masyarakat kritis terhadap penyalahgunaan kekuasaan.

Suggest remedies yang diajukan yaitu memastikan agar lembaga penegak hukum tidak dipolitisasi. Hal ini menunjukkan bahwa Tempo tidak sekadar mengkritik, tetapi juga memberikan penawaran solusi yang konstruktif. Narasi tersebut dapat memengaruhi pembaca agar mendukung gagasan reformasi dalam lembaga hukum, sekaligus meningkatkan tekanan masyarakat terhadap pemerintah agar melakukan tindakan dengan lebih transparan dan netral.

KESIMPULAN

Analisis *framing* editorial Tempo yang berjudul “Politisasi Penahanan Tom Lembong”, menyatakan bahwa media berperan penting dalam membentuk pandangan masyarakat terhadap isu hukum dan politik. Editorial Tempo juga menekankan jika penahanan tersebut merupakan bentuk politisasi hukum, yang memberi gambaran bahwa kejaksaan agung diduga digunakan sebagai instrumen politik oleh penguasa. Narasi ini mampu menciptakan keraguan terhadap netralitas lembaga penegak hukum di Indonesia.

Analisis *framing* dilakukan dengan mendefinisikan masalah sebagai politisasi, penggunaan kejaksaan agung sebagai instrument politik sebagai penyebab masalah, memberikan penilaian moral terhadap tindakan kejaksaan agung yang dipandang kerap tidak adil, serta menawarkan solusi berupa penegakan hukum harus ditegakkan dengan lebih transparan dan netral. Pendekatan ini tidak hanya sebagai analisis yang bersifat kritis tetapi juga konstruktif dengan memberikan dorongan reformasi terhadap lembaga penegak hukum serta meningkatkan tekanan masyarakat dalam menjaga prinsip keadilan.

Melalui analisis ini, disimpulkan bahwa *framing* oleh media seperti yang dilakukan oleh Tempo berpotensi dan berdampak besar dalam memengaruhi opini masyarakat, khususnya dalam isu keadilan hukum dan transparansi di tengah dinamika politik di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, T., & Undang, G. (2020). Dinamika Politik Dan Hukum Dalam Menggagas Paradigma Hukum Yang Berdaulat. *Global Mind*, 2(2), 16-25.
- Alrizki, D., & Aslinda, C. (2022). Analisis Framing Pemberitaan Indonesia Tidak Lockdown di kompas. com dan detik. com. *Journal of Political Communication and Media*, 1(01), 24-36.
- Anggraeni, D., & Damayanti, N. (2022). Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Indonesia. *Indigenous Knowledge*, 1(2), 188-196.
- Benmetan, T., & Setyowibowo, B. (2021). Media Dan Penciptaan Kepanikan Moral: Analisis Wacana Kritis Terhadap Pemberitaan Pandemi Covid-19 Di Tirto. Id. *Scriptura*, 11(2), 105-155.
- Chandra, C., Hartiana, T. I. P., & Krisdinanto, N. (2022). Melawan Extraordinary Crime Bernama Plagiarisme: Sebuah Bingkai di Liputan Utama Tempo. *MEDIAKOM: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6(01), 34-61.
- Effendy, E., Zakaria, Z., & Anggarana, A. (2023). Dasar Dasar Penulisan Berita. *Jurnal pendidikan dan konseling (JPDK)*, 5(2), 4041-4044.

- Kusumaningsih, R. (2024). Peran media dalam mempengaruhi opini publik tentang Hukum dan keadilan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 3(1), 27-40.
- Rahayu, P. B. (2023). Analisis Framing Pemberitaan Detiknews. com terkait Isu Penodaan Agama Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun. *Journal of Communication Sciences (JCoS)*, 6(1).
- Santoso, S. (2021). Analisis resepsi audiens terhadap berita kasus Meiliana di media online. *Komuniti: Jurnal Komunikasi Dan Teknologi Informasi*, 12(2), 140-154.
- Sartika, M. L., Ritonga, S., & Jailani, M. (2023). Analisis Framing Channel Youtube Dr. Richard Lee Tentang Keamanan Dan Strategi Pemasaran Produk Hn. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 2(4), 1347-1354.
- Siregar, A. K., & Qurniawati, E. F. (2022). Analisis Framing Pemberitaan Buzzer di tempo. co. *Journal of New Media and Communication*, 1(1), 1-15.
- Sofian, A., & Niken, D. (2021). Analisis framing pemberitaan tentang kebijakan pemerintah dalam menangani kasus Covid-19 (Analisis framing model Robert N. Entman pada media online Koran. tempo. co Edisi Maret 2020). *Commicast*, 2(1), 58-70.
- Wisnuwardhana, Najwan, R., & Azmi, F. (2023). Analisis Framing Media Detik. Com dan Kompas. Com Terhadap Isu LGBT. In *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ilmu Sosial (SNIIS)* (Vol. 2, pp. 134-143).